

**PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENYALURAN
BANTUAN LOGISTIK TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA BUMI DI
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU**

IRVAN GADING ROSADE SAID

29.1643

Kota Ambon, Provinsi Maluku

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: ipangbenjamin@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Problem/Background (GAP): Logistics assistance is one of the supporting factors for the success of a disaster management effort, the most important factor in humanitarian activities or disaster relief. However, in an effort to distribute logistical assistance for earthquake disaster management in West Seram Regency, which often encounter obstacles in the field and are considered by the community to be slow in implementation. **Purpose:** This study was conducted to determine the role of BPBD in West Seram Regency and the supporting and inhibiting factors in its implementation. **Method:** This research was conducted using a qualitative descriptive method and an inductive approach. Determination of research subjects was carried out using purposive sampling technique and the data sources in this study used primary data and secondary data and the data collection methods used were observation, interviews and documentation. This study uses an analysis of the theory of the role of public organizations according to Jones in Mahsun (2006:8) with the dimensions of the role of regulation, supervision, and direct role. **Result:** The results of this study indicate that the role of the Regional Disaster Management Agency of West Seram Regency in distributing logistical assistance for the emergency response to the earthquake in West Seram Regency in its implementation has not yet achieved optimal results. This is assessed based on three dimensions of the role, namely the role of regulation, the role of supervision and the direct role. To optimize the role of the West Seram Regency BPBD, it is carried out by: 1) Increasing socialization, 2) Increasing coordination, 3) Increasing the amount of the budget, and 4) Building local access. **Conclusion:** The role of BPBD of West Sream Regency in distributing logistical assistance for emergency response to the earthquake in West Seram Regency, Maluku Province is still experiencing many obstacles so that the role of BPBD is still not optimal so that people experience limitations in obtaining logistical assistance.

Keywords: Logistics Assistance, Distribution, Role of BPBD.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bantuan logistik adalah salah satu faktor pendukung dari keberhasilan suatu usaha penanggulangan bencana faktor terpenting dalam kegiatan kemanusiaan atau bantuan bencana. Namun dalam upaya penyaluran bantuan logistik penanggulangan bencana gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat yang sering mendapati hambatan di lapangan dan dinilai masyarakat lambat dalam pelaksanaannya. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

peranan BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dan faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta pendekatan induktif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling serta sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder serta metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis teori peranan organisasi publik menurut Jones dalam Mahsun (2006:8) dengan dimensi peranan regulasi, pengawasan, dan peranan langsung. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam penyaluran bantuan logistik tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pelaksanaannya belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini dinilai berdasarkan tiga dimensi peranan yaitu peran regulasi, peran pengawasan dan peran langsung. Untuk mengoptimalkan peranan BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan dengan cara: 1) Meningkatkan sosialisasi, 2) Meningkatkan koordinasi, 3) Menambah jumlah anggaran, dan 4) Membangun akses setempat. **Kesimpulan:** Peranan BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam penyaluran bantuan logistik tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku masih mengalami banyak hambatan sehingga peranan BPBD masih belum optimal sehingga masyarakat mengalami keterbatasan memperoleh bantuan logistik.

Kata kunci: Bantuan Logistik, Penyaluran, Peranan BPBD.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia terletak pada pertemuan empat lempeng utama dunia, yakni lempeng Benua Asia, Australia, Samudra Hindia dan lempeng Samudra Pasifik yang menyebabkan Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat bencana yang tinggi khususnya bencana gempa bumi. Melihat tingginya risiko bencana di Indonesia, Penanggulangan bencana harus dilakukan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Keputusan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Metodologi Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dirancang untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki rencana penanggulangan bencana. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai badan khusus untuk menangani segala bencana yang terjadi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan pembentukan tersebut agar strategi yang ditetapkan untuk penanggulangan bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dipastikan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Salah wilayah di Indonesia yang memiliki resiko bencana adalah wilayah Maluku. Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku. Pulau Maluku sendiri memiliki luas 74.505 km persegi berada pada 3°9'S 129°23'E. Iklim tropis dan iklim musim merupakan iklim yang mempengaruhi kondisi iklim di wilayah Maluku. Juga dikelilingi oleh lautan yang menjadi penyebab dari iklim ini. Terdiri dari sekitar 924% lautan 7,6% daratan yang berbentuk pulau yang terpisah-pisah menjadi sebanyak 1.412 pulau, serta panjang garis pantai hingga 10.662 km. Hal tersebut yang menjadikan Maluku menjadi salah satu Provinsi di Indonesia yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana dengan potensi bencana yang tinggi dengan indeks resiko bencana per Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori tinggi dan sedang. Kemudian Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat mengeluarkan Perda Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk mendukung program penanggulangan bencana yang dimana telah mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara Nasional yang Pemerintah Pusat dan Daerah telah tercakup di dalamnya.

Salah satu bagian dalam penanggulangan bencana yang sangat penting untuk keberhasilan adalah bantuan logistik. "Logistik adalah faktor terpenting dalam kegiatan kemanusiaan atau bantuan bencana, dan bagaimana Anda mengelola logistik kemanusiaan menentukan apakah kegiatan penanggulangan bencana berhasil atau gagal." (Van Wassenhove, 2006). Distribusi logistik menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan berpedoman pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Logistik, yang mencakup segala hal mulai dari pelaksanaan hingga pelaporan dukungan logistik. Penyaluran bantuan merupakan hal yang paling diharapkan oleh masyarakat ketika terjadi bencana. Keterlambatan dan tidak tepat sasaran penyaluran logistik dapat menyebabkan dampak bencana semakin besar.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada tahun 2019 tepatnya pada 26 september bencana gempa bumi tektonik berkepanjangan melanda Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil dari analisis dari BMKG yang menunjukkan informasi awal dimana gempabumi ini berkekuatan $M=6,8$ yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran menjadi $M=6,5$. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 3,38 LS dan 128,43 BT, atau yang lebih tepatnya tepatnya berlokasi di darat pada jarak 40 km Timur laut Kota Ambon, 32 Km Barat Laut Saparua Maluku Tengah. Gempa yang terjadi dalam 3 hari berturut-turut tersebut berdampak serius berupa korban jiwa dan luka-luka, kerusakan bangunan sekolah hingga berbagai fasilitas umum. Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Ambon menunjukkan hal menarik dari gempa dalam rentan waktu September sampai dengan Oktober dimana total dari keseluruhan bencana gempa hingga bencana susulan yang tercatat mencapai angka 5.100 kali yang mengguncang wilayah Maluku sepanjang tahun 2019. Jumlah gempa yang terjadi di wilayah Maluku sebanyak 5.013 dengan magnitudo kurang dari 5 yang merupakan jumlah sisanya.

Kluster aktifitas gempa bumi yang paling aktif selama tahun 2019 terjadi di wilayah Pulau Seram dan sekitarnya, hal ini dilihat berdasarkan peta aktifitas gempa bumi (seismisitas). Kerusakan demi kerusakan terjadi pada berbagai fasilitas umum dan rumah masyarakat yang rusak bias mencapai angka ribuan. Sesuai dengan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku korban jiwa mencapai 49 orang dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. per tanggal 09 Oktober 2019 angka korban jiwa mencapai 20 orang dengan 7 orang yang meninggal pada hari pertama gempa bermagnitudo 6,8, kemudian sisanya meninggal saat dirawat di rumah sakit dan pada lokasi pengungsian dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2019/10/09/17570801/jumlah-korban-jiwa-akibat-gempa-di-seram-barat-bertambah-jadi-20-orang>. Dari bencana tersebut juga berdampak pada kerusakan fasilitas pemerintah berjumlah 9 unit, fasilitas kesehatan 10 unit, fasilitas pendidikan 46 unit serta 31 rumah ibadah mengalami kerusakan. Hal ini juga berdampak kepada masyarakat yang dimana jumlah pengungsi mencapai angka 127.000 jiwa.

Dari segi karakteristik pada Pulau Seram itu sendiri memiliki banyak dataran tinggi dan pegunungan, hal ini kemudian yang menjadi keuntungan sekaligus menjadi hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana terutama dalam urusan penyaluran bantuan, hal-hal yang berkaitan dengan sarana prasarana yang harusnya menjadi faktor pendukung justru berbalik menjadi boomerang pada BPBD di beberapa daerah dikarenakan keterbatasan dari sarana prasarana. Kemudian hambatan yang sering di hadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten SBB, dikutip dari kompas.com Pemerintah Provinsi Maluku mengakui bahwa dalam penyaluran bantuan kepada

pengungsi korban gempa bumi terdapat kendala yang menghambat yakni mobilisasi yang tidak mendukung dikarenakan faktor jalur dan medan yang ditempuh sulit karena lokasi pengungsian biasanya berada pada daerah hutan dan perbukitan, sehingga kerap kali BPBD sering dinilai lambat dalam proses penyaluran bantuan logistik. Dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2019/10/08/17394711/pemprov-maluku-akui-penyaluran-bantuan-untuk-korban-gempa-terkendala>. Juga pada beberapa kesempatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat memanfaatkan jaringan terbawah pada tiap daerah pengungsian seperti Kepala Dusun untuk menjadi perpanjangan tangan BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam upaya penanggulangan bencana dalam hal penyaluran bantuan logistik untuk korban bencana.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks peranan BPBD dalam penanggulangan bencana maupun penyaluran logistik. Penelitian Sugipto, Erwin Resmawan (2015) yang berjudul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Samarinda (Sugipto & Resmawan :2015) menemukan bahwa BD Kota Samarinda telah menjalankan peran dengan optimal dengan menjalankan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana (Sugipto & Resmawan :2015). Penelitian Iskaputri A, Raazak A, & Arifin M (2020) yang berjudul Manajemen Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Iskaputri, Raazak, & Arifin :2020) menemukan bahwa Manajemen yang baik merupakan kunci keberhasilan penyaluran logistik dalam penanggulangan bencana (Iskaputri, Raazak, & Arifin :2020). Penelitian Martinus Syamsudin (2019) yang berjudul efektifitas kebijakan penyaluran logistik bencana (Syamsudin :2019) menemukan bahwa Mekanisme penyaluran bantuan yang dilakukan sesuai dengan SOP meningkatkan efektifitas tetapi belum mencapai hasil yang maksimal (Syamsudin :2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyaluran bantuan logistik tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dengan penelitian Sugipto, Resmawan, Syamsudin dan Iskanputri dkk. Selain itu penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni analisis teori peranan organisasi publik menurut Jones dalam Mahsun (2006:8) dengan dimensi peranan regulasi, pengawasan, dan peranan langsung.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dan faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian dan menganalisis data menggunakan teori (Creswell:2013) yaitu melalui reduksi data, data display/ penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing atau Verification). Data diperoleh dengan teknik Triangulasi data menurut (Sugiono:2016) yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan

pengumpulan data wawancara dengan teknik purposive sampling terhadap informan yaitu Kepala BPBD, Kabid Kedaruratan dan Logistik, Kasubag Perencanaan, Penata Penanggulangan Bencana, Staff, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis teori analisis teori peranan organisasi publik menurut Jones dalam Mahsun (2006:8) dengan dimensi peranan regulasi, pengawasan, dan peranan langsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyaluran bantuan logistik tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan analisis teori analisis teori peranan organisasi publik menurut Jones dalam Mahsun (2006:8) dengan dimensi peranan regulasi, pengawasan, dan peranan langsung. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Regulatory Role (Peran Regulasi)

Penulis melakukan pengukuran terhadap peran regulasi. Suatu organisasi dalam melaksanakan perannya dibutuhkan regulasi yang jelas untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan di lapangan. Regulasi sendiri adalah peraturan dibuat untuk mengatur kelompok masyarakat, lembaga/organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat 2 (dua) indikator untuk mengukur dimensi peran regulasi dari BPBD, indikator tersebut meliputi Visi Misi serta Tugas dan Fungsi:

- 1) Visi dan Misi. Pada suatu organisasi/badan sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing terlebih dahulu membuat visi misi yang bertujuan untuk menjadi pedoman atau pegangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi daripada suatu instansi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Visi Misi Kabupaten Seram Bagian Barat itu sendiri telah mengaplikasikannya dengan baik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kebijakan. Arah kebijakan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat merujuk pada 2 misi Kabupaten yakni Misi 5 dan Misi 6 dari RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2017-2022. Sehubungan dengan Misi 5 yakni Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Misi 6 yakni Mempercepat Pembangunan Infrastruktur. BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat telah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ada dalam hal penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat yang terkena dampak bencana alam. Akan tetapi untuk kebijakan khusus dari BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat sendiri belum ada.
- 3) Tugas dan Fungsi. Sebagai unsur penunjang Kepala Daerah dalam pengelolaan amanat Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana, BPBD mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat No.26 Tahun 2016, pada Bab 7 Pasal 18-20. BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan logistik bencana masih berpedoman daripada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik tetapi masih belum optimal.

3.2. Enabling Role (Peran Pengawasan)

Penulis melakukan pengukuran terhadap peran pengawasan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan tugas di lapangan selain menjadi pihak penyalur bantuan BPBD juga melaksanakan fungsi pengawasan dimana pada setiap pelaksanaan kegiatan secara langsung ditunjuk penanggung jawab kegiatan di lapangan yang akan melaporkan setiap hasil kegiatan.

- 1) Ketersediaan anggaran. Sumber anggaran daripada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri bersumber dari dana siap pakai yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang tersedia untuk BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat terbilang minim, tetapi dalam pengelolaannya pihak BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dapat mengelola anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di lapangan sehingga dalam pelaksanaan penyaluran bantuan logistik dapat tersalurkan sesuai dengan rencana.
- 2) Ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan daripada suatu kegiatan dalam organisasi tidak terlepas daripada peran SDM yang berkompeten dan terampil serta aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Pegawai tetap BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat yang berjumlah 24 orang yang telah mengisi semua bagian dari Kepala Pelaksana sampai dengan Pengelola Administrasi Seksi Rekonstruksi dan juga dengan pegawai honorer sebagai staff pelaksana di lapangan yang berjumlah 28 orang. SDM yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Barat terbilang minim untuk pelaksanaan penyaluran bantuan logistik bencana di daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang sangat luas.
- 3) Ketersediaan sarana prasarana. SDM yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Barat terbilang minim untuk pelaksanaan penyaluran bantuan logistik bencana di daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang sangat luas. Namun ada beberapa perangkat yang digunakan untuk mobilisasi pengungsian dan tidak dapat digunakan karena rusak dalam pelaksanaan penyaluran bantuan logistik bencana.
- 4) Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan logistik. Dalam pendistribusian bantuan logistik BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat didampingi oleh supervisor untuk mengawasi pelaksanaan pendistribusian bantuan logistik agar sesuai dengan perencanaan, waktu yang ditetapkan, peraturan yang berlaku, jenis, jumlah, mutu, dan sasarannya. Kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan logistik bencana, berikut hal-hal yang biasanya menjadi bahan evaluasi Mekanisme dari pelaksanaan, Ketepatan jumlah, mutu dan sasaran, Moda distribusi yang digunakan, Biaya, dukungan yang digunakan, Manfaat dari bantuan yang didistribusikan

BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pelaporan kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi media sosial yakni aplikasi Whatsapp untuk melaporkan hal-hal yang terjadi di lapangan, sehingga jika terjadi hal yang menghambat dapat segera dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti, sayangnya pada beberapa daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki jaringan yang tidak mendukung. Dan dari hasil dokumentasi di lapangan tersebut dijadikan bahan laporan oleh supervisor yang ikut mendampingi kegiatan penyaluran bantuan logistik bencana.

3.3. Direct Role (Peran Langsung)

Penulis melakukan pengukuran peran langsung Suatu organisasi dalam pelaksanaan kegiatan sudah pasti memiliki Direct Role atau peran langsung yang berarti dalam kegiatan penyaluran bantuan logistik BPBD ikut serta dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan logistik bencana agar sesuai dengan regulasi yang ada.

- 1) Koordinasi antar lembaga. Saat dalam situasi terjadi bencana BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat tidaklah bergerak sendiri untuk menanggulangi bencana yang terjadi, BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat selalu melakukan koordinasi dengan Lembaga/Instansi lain agar ikut serta dalam proses penanggulangan bencana.
- 2) Upaya Penyaluran bantuan logistik dan sosialisasi. upaya penyaluran logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan dengan mempedomani regulasi yang ada dan dengan secepat mungkin untuk menindaklanjuti laporan yang terima untuk melakukan penyaluran bantuan logistik bencana. Setelah mendistribusikan bantuan kepada masyarakat korban terdampak bencana pihak BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat juga langsung melakukan sosialisasi mengenai penggunaan barang bantuan. Dalam penyaluran bantuan logistik tidak serta merta bantuan langsung di distribusikan pada masyarakat, semua proses tersebut telah diatur dalam prosedur pendistribusian bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. penyaluran bantuan logistik pihak BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat belum optimal dikarenakan beberapa masyarakat yang mengaku bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan pada saat mengungsi di daerah pegunungan. Kemudian BPBD melakukan sosialisasi perihal penggunaan atau pemakaian daripada bantuan logistik dan peralatan yang telah diberikan, arahan yang diberikan merujuk pada pemakaian bantuan dengan hemat, di karenakan gempa bumi yang terjadi berulang dan tak pasti kapan berhentinya. Tetapi belum membahas pada SOP penyaluran bantuan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Salah satu kegiatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang biasanya menjadi tolak ukur masyarakat daripada keberhasilan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana adalah tersalurkannya bantuan logistik kepada kelompok masyarakat yang terdampak bencana. Dalam penyaluran bantuan logistik tidak serta merta bantuan langsung di distribusikan pada masyarakat, semua proses tersebut telah diatur dalam prosedur pendistribusian bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Penyaluran bantuan logistik pihak BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat belum optimal dikarenakan beberapa masyarakat yang mengaku bahwa mereka tidak mendapatkan bantuan pada saat mengungsi di daerah pegunungan. Beberapa kelompok masyarakat yang belum mengetahui prosedur dari penyaluran bantuan logistik bencana sering mengeluh dengan waktu penyaluran bantuan logistik yang dinilai masyarakat tersebut terlambat, padahal pada dasarnya SOP dari penyaluran bantuan logistik bencananya memang membutuhkan waktu untuk mendata masyarakat yang mengungsi serta menetapkan jumlah logistik dan peralatan yang dibutuhkan. Hal ini samahalnya yang ditemukan (Syamsudin :2019).Mekanisme penyaluran bantuan yang dilakukan sesuai dengan SOP meningkatkan efektifitas tetapi belum mencapai hasil yang maksimal

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan terdapat faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat suatu kegiatan, seperti dalam peran Badan Penanggualangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam upaya penyaluran bantuan logistik bencana. Faktor pendukung biasanya datang dari luar, yaitu dengan BPBD melakukan koordinasi dengan Lembaga/Instansi lain hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan BPBD Bagian Barat untuk memaksimalkan upaya penyaluran bantuan

logistik guna mencapai keberhasilan yang optimal, tetapi BPBD belum maksimal dalam melakukan koordinasi, hal ini terbukti terdapat masyarakat yang mengungsi pada daerah pegunungan tidak mendapatkan bantuan sama sekali. menjalankan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan penanggulangan sangatlah penting seperti yang ditemukan (Iskaputri, Raazak, & Arifin :2020). Faktor penghambat penyaluran bantuan logistik sarana prasarana yang tidak memadai, SDM yang terbatas, medan tempat pengungsian sulit dijangkau, masyarakat yang mengungsi tidak pada tempat yang di sediakan. Kemudian dari faktor-faktor penghambat yang ada dirangkum oleh BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menjadi pengalaman dan juga sebagai bahan evaluasi untuk selalu berusaha membenahi diri agar kedepannya. Perlunya bahwa Manajemen yang baik merupakan kunci keberhasilan penyaluran logistik dalam penanggulangan bencana (Iskaputri, Raazak, & Arifin :2020).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peranan dari BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai penyelenggara utama atau koordinator dari pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah, dalam kegiatan penyaluran bantuan logistik saat terjadi bencana di daerah BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kewajiban untuk mengatur rencana kegiatan mulai dari pendataan jumlah korban terdampak bencana yang mengungsi pada tempat pengungsian, mengatur jumlah logistik dan peralatan yang dibutuhkan, sampai dengan penyalurannya menjadi tanggungjawab dari BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat. BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan logistik bencana berpedoman pada SOP (standar operasional prosedur) yang ada, dimana SOP tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Bantuan Logistik dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Hal tersebut yang kemudian menjadi tolak ukur bahwa BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat belum melaksanakan tugasnya untuk menyalurkan bantuan logistik bencana dengan optimal, hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan logistik, dan juga beberapa kelompok masyarakat yang belum mengetahui prosedur dari penyaluran bantuan logistik bencana sering mengeluh dengan waktu penyaluran bantuan logistik yang dinilai masyarakat tersebut terlambat, padahal pada dasarnya SOP dari penyaluran bantuan logistik bencananya memang membutuhkan waktu untuk mendata masyarakat yang mengungsi serta menetapkan jumlah logistik dan peralatan yang dibutuhkan. Hambatan yang ditemui oleh BPBD yaitu sarana prasarana yang tidak memadai,- SDM yang terbatas, medan tempat pengungsian sulit dijangkau, masyarakat yang mengungsi tidak pada tempat yang di sediakan. Guna meningkatkan peranan disarankan penambahan sosialisasi, meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi, melakukan koordinasi vertikal, mengajukan proposal penambahan dana, serta mempermudah akses kebutuhan BPBD.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga memiliki keterbatasan dalam melakukan bahasan manajemen penyaluran logistik yang hanya berfokus pada peranan BPBD saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi dan pembahasan serupa berkaitan Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyaluran bantuan logistik tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dan jajarannya serta masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Iskaputri A., Raazak A., & Arifin M.(2020) *Manajemen Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. 2020
- Mahsun, M (2006) *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE
- Martinus Syamsudin (2019) *Efektifitas Kebijakan Penyaluran Logistik Bencana*. 2019
- Sugipto Beong, Erwin Resmawan R. K. (2015) *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam DI Kota Samarinda*. 2015
- Peraturan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Bantuan Logistik
Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Sumber Lain
Gempa bumi Maluku 2019 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas JDIH BPK RI <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147369/perda-kab-seram-bagian-barat-no-4-tahun-2019>
- Pemprov Maluku Akui Penyaluran Bantuan untuk Korban Gempa Terkendala <https://regional.kompas.com/read/2019/10/08/17394711/pemprov-maluku-akui-penyaluran-bantuan-untuk-korban-gempa-terkendala>
- Pengungsi Gempa di Seram Bagian Barat 109.066 Jiwa, 2 Meninggal
Jumlah Korban Jiwa akibat Gempa di Seram Barat Bertambah Jadi 20 Orang <https://regional.kompas.com/read/2019/10/09/17570801/jumlah-korban-jiwa-akibat-gempa-di-seram-barat-bertambah-jadi-20-orang>.